

Studi Eksplanatif Penyebab Gerakan Separatis Minoritas Muslim Moro di Filipina

Eva Putriya Hasanah
Global Peace Foundation Indonesia
Email: evapoutriya@gmail.com

Abstract

This qualitative research aims to analyze the cause of the spatial movements perpetrated by the Moro Muslim community in Southern Philippines. The results of the analysis in this study indicate that there are three things that cause Muslim societies Moro do separatist movement. First, there is bad experience in the context of history. Second, the existence of a series of crimes against humanity experienced by post-independence Philippine Muslims, including jабidah, upi, barrio, and buldon event that shows violence against Muslims. Third, there is a failure of efforts by the government to resolve the conflict in the Southern Philippines.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisa penyebab terjadinya gerakan separatis yang dilakukan oleh masyarakat muslim Moro di Filipina Selatan. Hasil dari analisa pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga hal yang menyebabkan masyarakat muslim Moro melakukan gerakan separatis. Pertama, adanya pengalaman buruk dalam konteks sejarah. Kedua, adanya rangkaian kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh muslim Filipina pasca kemerdekaan, diantaranya peristiwa jабidah, upi, barrio, dan buldon yang menunjukkan kekerasan terhadap muslim. Ketiga, adanya kegagalan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Filipina Selatan.

Kata-Kata Kunci: Moro; Diskriminasi; Minoritas; Separatis; Konflik

Pendahuluan

Muslim Moro merupakan kelompok minoritas di Filipina selatan. Kata Moro sendiri berasal dari kata Moor yang berasal dari bahasa Spanyol yaitu Moor berarti buta huruf, jahat, tidak bertuhan dan *juramentados* (tukang bunuh).¹ Dalam sejarah negara Filipina, agama islam pada awalnya merupakan kelompok mayoritas, namun sejak kedatangan spanyol untuk menjajah Filipina telah berhasil mengkristenkan penduduk Filipina ketika itu, kecuali masyarakat Islam Filipina di

Selatan pulau-pulau Palawan, Sulu dan Mindanao yang sangat sulit untuk dikuasai.² Posisi masyarakat muslim yang awalnya sebagai mayoritas yang kemudian menjadi minoritas ini akibat kristenisasi yang dilakukan pada masa penjajahan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya diskriminasi terhadap muslim Moro hingga sekarang.

Adanya kelompok minoritas muslim di Filipina Selatan ini telah muncul isu separatisme yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis untuk kemerdekaan bangsa Moro, seperti *Mindanao Independent Movement* (MIM), Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) sehingga berujung pada konflik antara pemerintah dan kelompok pejuang di Filipina Selatan. Dalam sejarahnya, konflik di Filipina Selatan merupakan konflik yang sangat tua dan klasik, yang mana hal tersebut berawal dari penolakan penduduk Mindanao terhadap upaya penjajahan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-15 Masehi. Selama masa penjajahan, Spanyol menerapkan politik *divide and rule* (pecah belah dan kuasai) dan *mission secret* (misi suci) penyebaran agama Kristen terhadap orang-orang Islam yang berada diwilayah Mindanao dan Sulu. Spanyol dalam menjajah Filipina dengan sengaja menciptakan *image* yang buruk terhadap orang Muslim Filipina yang berada di Selatan.³ Namun konflik tersebut tetap berlangsung bahkan setelah Filipina merdeka yang dianggap akibat gerakan-gerakan separatis muslim Moro.

Mengutip pendapat dari Strobe Driver yang mengatakan bahwa pemerintah ikut berkontribusi dalam pembentukan suatu pemberontakan yang terjadi di dalam suatu negara.⁴ Peneliti melihat bahwa dalam gerakan separatis muslim Moro ini terjadi bukan hanya semata-mata keinginan untuk memisahkan diri melainkan terdapat faktor pendorong atau latar belakang yang kuat dari pemerintah sehingga menyebabkan munculnya gerakan separatis Moro. Apalagi kelompok ini merupakan minoritas di negara tersebut, yang mana isu terhadap perlindungan hak-hak minoritas juga masih sontar dibicarakan dalam dunia internasional. Berangkat dari asumsi peneliti tersebut, maka dalam paper ini peneliti akan berfokus untuk menganalisa penyebab terjadinya gerakan separatis muslim Moro di Filipina Selatan.

Sejarah Kolonialisme di Filipina

Filipina merupakan negeri kepulauan yang terdiri dari 7.109 pulau tropis dengan luas total wilayah 29.629.00 hektare.⁵ Pulau yang paling besar adalah Luzon dan Mindanao, yang merupakan dua pertiga seluruh Filipina. Pulau lainnya: Mindoro, Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar dan Masbate serta Pulau Palawan.⁶ Ibu Kotanya Manila. Terdiri dari beragam etnis, bahasa dan agama. Mayoritas beragama Katolik. Menurut catatan sensus resmi Filipina pada tahun 1990 jumlah kelompok muslim 5% dari keseluruhan penduduk Filipina. Yakni sekitar 2,8 juta jiwa dari jumlah total populasi 65 juta penduduk. Sementara itu,

berbagai sumber lainnya menyebutkan bahwa sekarang ini setidaknya terdapat kurang lebih 7 juta penduduk muslim, artinya mencapai 10% dari total penduduk Filipina. Jumlah itu cukup menjadikan komunitas muslim sebagai kelompok minoritas, baik dari segi budaya, maupun politik, di tengah-tengah bangsa Filipina yang mayoritas beragama Katolik. Mayoritas muslim Filipina bertempat tinggal di kawasan Filipina Selatan. Khususnya di Pulau Mindanao dan kepulauan Sulu.⁷

Islam diperkenalkan ke Filipina pada tahun 1210 oleh para pedagang Arab dan penyebar Islam, 300 tahun sebelum masuknya Kristen Katolik ke Filipina melalui kolonialisme Spanyol pada tahun 1521. Pada kolonialisme Spanyol, Islam telah membentuk beberapa komunitasnya di wilayah pantai dari pulau-pulau besar di Filipina termasuk Manila.⁸ Dari 75 kelompok etnis yang ada di Filipina, menurut John L Esposito dan Cesar Adib, mengkalifikasikan 12 kelompok etnik muslim yang ada di Filipina yaitu Manguindanao, Maranao, Iranun, Tausug, Sama'i, Yakan, Jama mapun, Palawani, Kalagan, Kalibugan, Sungil dan Badjo.⁹

Sejarah kedatangan Bangsa Spanyol di Filipina tidak terlepas dari kejatuhan konstantinopel tahun 1453. Bangsa Spanyol menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Filipina pada tanggal 16 Maret 1521 di Pulau Samar melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Ia menyebut wilayah baru itu dengan "Philippine", sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Philip II yang berkuasa di Spanyol ketika itu.¹⁰ Tujuan utama penaklukan Filipina oleh Spanyol adalah karena tarikan politik (kebanggaan menjadi empayar besar dunia), ekonomi (monopoli perdagangan) dan tarikan missionaris (proses pemurta dan paksa umat Islam Filipina menjadi Kristian). Tercatat nama-nama missionaris paling bersemangat tinggi, seperti Father Andreas de Urdanette, Augustinian (1517), Fransician (1577), Jesuit (1581), Dominican (1587) dan Augustinian Resollect (1606).¹¹

Dalam mencapai misinya yang ketiga yaitu kristenisasi terhadap penduduk muslim di Filipina dilakukan dengan berbagai cara oleh Spanyol. Salah satunya dengan adanya dukungan berupa bantuan keuangan dan senjata/kekerasan kerajaan Spanyol, menyebabkan proses pemurtadan berlangsung sistematis dan berjaya, sehingga saat ini 83% penduduk Filipina adalah penganut Kristian Katolik, dan merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berpenduduk Kristian terbesar.¹² Selain itu cara yang digunakan oleh Spanyol adalah dengan memberikan hadiah dan posisi sosial, agar orang Islam bersedia memeluk Kristian. Dan untuk selanjutnya mereka yang telah dikristenkan, akan menjadi sekutu Spanyol dalam menambah luas lagi pengaruhnya ke selatan.¹³ Dalam berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Spanyol, hal demikian tidak menjamin seluruh penduduk Filipina berhasil di kristenkan, bahkan ada dari mereka yang menolak dan melakukan perlawanan. Melainkan Filipina Selatan tidak dapat di pengaruhi oleh Bangsa Spanyol bahkan hingga sekarang. Hal ini yang kemudian menjadi cikal bakal Filipina Selatan menjadikan minoritas muslim menjadi terdiskriminasi.

Pada tahun 1898, Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat termasuk juga wilayah Moro, Spanyol mengklaim wilayah Moro termasuk sebagai daerah jajahannya. Hal ini ditandai dengan adanya *Treaty of Pari*, di mana Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat dengan harga 20 juta dolar Mexico.¹⁴ Pada tahun 1934, melalui Tydings McDuffie Act, Amerika Serikat mengizinkan Filipina merdeka pada tahun 1944. Sebuah pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1935 untuk memilih Presiden *Commonwealth of the Philippines*. Pemilihan itu dimenangkan oleh Manuel L. Quezon dan kemudian sebuah pemerintahan Filipino dibentuk dengan dasar konstitusi Amerika Serikat. Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946, antara tahun 1946-1972, Filipina terus menggunakan sistem dua partai seperti Amerika Serikat. Sebagai presiden pertama pasca kemerdekaan Filipina adalah Manuel Roxas, Manuel Roxas terpilih sebagai presiden dari partai Liberal mengalahkan lawan politiknya yaitu Osmena. Masa diawal-awal kemerdekaan Filipina, peranan Amerika Serikat sangat dominan dalam merekonstruksi kembali Filipina.¹⁵ Dan menyebabkan pengaruh Amerika Serikat masih sontar terlihat.

Adanya berbagai konflik yang terjadi di Filipina termasuk dalam kejadian pembantaian muslim Moro di Jabidah telah mengundang reaksi dunia termasuk OKI, Malaysia, dan Libya. Sejak tahun 1972, OKI sering membicarakan permasalahan Muslim Filipina Selatan, bahkan dijadikan OKI sebagai agenda tahunan dengan negara-negara anggota. OKI mendesak pemerintah Filipina yang pada waktu itu pada masa pemerintahannya Marcos guna untuk menyelesaikan permasalahan dengan Muslim Moro.¹⁶ OKI dan Libya memiliki peranan penting dalam menjadi mediator antara pemerintah Filipina dengan MNLF sehingga melahirkan persetujuan bagi otonomi tiga belas provinsi di Selatan dimana presentase Muslim yang terbesar. Selain itu, upaya desakan diplomatik juga telah dilakukan oleh negara-negara seperti Malaysia dan Libya kepada Filipina.¹⁷

Untuk meredam berbagai konflik yang terjadi di Filipina Selatan, pemerintah Filipina sendiri telah melakukan berbagai upaya. Pertama, *Tripoli Agreement 1976* merupakan suatu perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina dengan MNLF pada tahun 1967 pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Perjanjian Tripoli ditandatangani di Tripoli, Libya oleh ketua MNLF Nur Misuari dan Wakil Menteri Pertahanan Carmelo Barbero pada tanggal 23 Desember 1976, sebulan setelah ibu sang senator, Ibu Negara dan sekarang Ilocos Norte Rep Imelda Marcos, mengunjungi Tripoli untuk bertemu dengan pemimpinnya, Muammar Qaddafi.¹⁸

Kesepakatan tersebut diberikan untuk pembentukan sebuah daerah otonom yang terdiri dari 13 provinsi dan kota-kota di sana pada tahun sembilan di Mindanao dan Palawan: Basilan, Davao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Cotabato Utara, Cotabato Selatan, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur - semua di Mindanao dan Palawan dan kota-kotanya di dalamnya. Dengan pembentukan provinsi baru dan konversi kota

menjadi kota, wilayah otonomi sekarang terdiri dari 16 provinsi dan 16 kota, 15 provinsi dan 15 kota di antaranya dari 27 provinsi di Mindanao dan 33 kota.¹⁹

Selain itu, terdapat pula upaya-upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah Filipina seperti adanya perjanjian *Jeddah Accord*, *Peace Agreement* 1996, Pembentukan Kementerian Urusan Agama Islam, Pembentukan Badan Pengelola Perjalanan Haji Filipina, Mendirikan Institut Studi-studi Islam Universitas Manila, Mendirikan King Faisal Centre for Islamic and Arabic Studies, Mindanao State University, Pusat Studi Perdamaian Filipina Selatan (*Southern Philippines Center for Peace Studies*), dan Melancarkan Philippines Amanah Bank dan Dana Pembangunan Muslim.

Penyebab Gerakan Separatis di Filipina

Konflik yang terjadi di Filipina Selatan yang melibatkan muslim Moro tidak murni akibat gerakan *separatisme* oleh kelompok-kelompok muslim Moro. Berdasarkan konteks sejarah Filipina mulai dari masa penjajahan sampai dengan Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat, orang-orang Islam disana telah mendapat banyak diskriminasi dalam memperoleh hak-haknya. Hasil analisa peneliti, terdapat 3 penyebab terjadinya gerakan separatis di Filipina Selatan, yaitu adanya pengalaman diskriminasi di masa lalu; adanya kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh minoritas Moro pasca kemerdekaan; dan gagalnya upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak minoritas Moro.

Pengalaman Diskriminasi di Masa Lalu

Di era penjajahan, masyarakat muslim telah mengalami berbagai pemaksaan. Lihat saja pada masa penjajahan Spanyol, masyarakat muslim di paksa untuk keluar dari agama islam dan memeluk katolik seakan-akan mereka tidak memiliki hak untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya sendiri. Begitu juga pada masa penjajahan Amerika Serikat di Filipina, meski pada awal penjajahannya AS sangat baik terhadap masyarakat yang ditandai dengan *Perjanjian Bates* pada 1898. Isi dari perjanjian ini adalah bahwa Amerika Serikat tidak akan campur tangan dalam masalah intern Umat Islam Sulu, dan sebaliknya Umat Islam juga tidak campur tangan dalam peperangan antara Amerika Serikat dengan pemberontak Filipina (1899-1901).

Namun, setelah peperangan berakhir, mulailah Amerika melakukan banyak sikap yang memperlihatkan untuk mendiskriminasi kaum muslim. Salah satu AS merancang penyatuan wilayah Sulu dan sekitarnya yang sebelumnya diperintah oleh Sultan dan Datu Sulu ke dalam wilayah Filipina, dan mulai sejak itu Umat Islam menolak penguasa Amerika dengan semua kebijakannya. Sehingga, seorang pemimpin tentara Islam, Panglima Hasan dan pengikutnya berusaha menyerang

Amerika Serikat di Sulu pada 1901 hingga Maret 1904, ketika itu Hasan dapat dibunuh. Penentangan paling sengit dilakukan oleh Bud Dajo pada 1906. Peperangan ini melibatkan 790 orang tentara Amerika dan 1000 orang umat Islam. Dalam peperangan ini diperkirakan 600 orang umat Islam syahid.²⁰

Tak hanya itu, AS juga melakukan kebijakan yang menguntungkan kaum nasionalis yaitu dengan dicetuskannya salah satu konsep kebijakan Amerika yang dituangkan dalam *Philippine Bill* tahun 1902, yang membagi wilayah Islam selatan menjadi lima bahagian : Zamboanga, Lanao, Cotabato, Davao dan Sulu, dan akan diperintah langsung oleh Amerika dari Manila. Latar belakang penubuhan wilayah Moro, adalah desakan kaum Nasionalis Kristian, agar wilayah Moro masuk ke dalam wilayah Filipina, sehingga seluruh cukai, baik cukai kepala maupun cukai jalan di selatan dapat masuk ke pemerintah pusat di Manila.²¹

Jabatan Wilayah Moro diperbaharui menjadi Jabatan Mindanao dan Sulu (1914-1920). Di mana Mindanao dan Sulu digabungkan dengan Luzon dan Visayas. Tujuan penyatuan ini adalah menghilangkan eksklusifisme Islam wilayah Mindanao dan Sulu, dan mewajibkan pelajar-pelajar Islam masuk sekolah umum, dan para pelajar *Pensionados* (mereka yang mendapat beasiswa pemerintah) diberi peluang masuk pendidikan yang lebih tinggi di Manila ataupun ke Amerika Serikat. Pimpinan dan umat Islam Moro keberatan atas kebijakan tersebut, tapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menolaknya. Pada Februari 1920, Jabatan Mindanao dan Sulu akhirnya diganti dengan Akta 2878 Undang-undang Filipina, dan Akta ini mengakhiri penjajahan Amerika Serikat atas Filipina, dan selanjutnya pengawalan penduduk Moro dilakukan oleh Biro Suku-suku Non-Kristian (*Bureau of Non-Christian Tribes*), yang dikendalikan oleh Kristen Filipina sendiri.²²

Sebelum kekuasaan diserahkan kepada Filipina Utara, pada Bulan Agustus 1916 pemerintah Filipina mendapat hak legislatif untuk menguasai tanah Moro. Peristiwa ini sangat berpengaruh terhadap semakin dominannya peran bangsa non-muslim Filipina terhadap perkembangan Moro. Mereka membuka lahan pertanian dan mengeluarkan peraturan tentang pertanahan secara sepihak. Pada tahun 1919 pemerintah mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh tanah di Filipina adalah milik negara. Dan pada tahun 1944 dibangun pemukiman secara besar-besaran di wilayah Mindanao, kemudian dibuat program migrasi dalam jumlah besar.²³

Konteks sejarah yang memperlihatkan banyak pemaksaan terhadap umat Islam di Filipina ketika itu, banyak membuat mereka kehilangan haknya sebagai orang-orang merdeka, yang mana sejarah menunjukkan bahwa segala aktivitas yang dilakukan lebih menguntungkan kaum-kaum non-muslim. Adanya hal tersebut menjadi sebuah pengalaman yang sangat pahit bagi masyarakat muslim di Filipina dalam sejarah, sehingga sulit untuk dilupakan.

Kejahatan Kemanusiaan yang Dialami oleh Minoritas Moro Pasca Kemerdekaan

Selain konteks sejarah pada masa penjajahan, diskriminasi terhadap minoritas Moro tetap dirasakan. Sebagaimana rangkaian-rangkaian peristiwa kejahatan kemanusiaan yang mengakibatkan masyarakat Moro menjadi korbannya.

Pertama, Peristiwa Jabidah. Bentuk dari tragedi Jabidah yaitu berupa pembantaian atau pembunuhan yang terjadi di Corregidor, Barat Daya Manila pada 18 Maret 1968. Tragedi ini dilatarbelakangi ketidaksukaan pemerintah Filipina terhadap muslim Moro di sebelah Selatan Filipina. Pemerintah membentuk operasi merdeka untuk memancing pemuda muslim mengikuti latihan militer di pulau Corregidor.²⁴ Pulau Corregidor adalah sebuah wilayah yang terletak di sebelah Barat kota Manila. Pulau ini memiliki kepentingan strategis bagi Filipina karena pulau ini adalah salah satu markas militer dan *tank* pelatihan tentara Filipina. Peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Jabidah adalah peristiwa pembantaian terhadap muslim Moro di Filipina pada masa rezim Ferdinand E Marcos yang pada 1966, terbongkar kasus pembunuhan besar-besaran terhadap Umat Islam yang disebut "Peristiwa Jabidah", yang melibatkan 180 orang pemuda Islam.²⁵ Pembantaian Jabidah mengacu pada pembunuhan massal sejumlah rekrutan pemuda Moro dari Sulu dan Tawi-Tawi, berusia 18-30 tahun. Jumlah yang tewas versi Filipina adalah 28-60 orang. Sementara versi pejuang Moro MILF hingga 200 jiwa. Para korban diberondong senjata oleh petugas militer di Pulau Corregidor.²⁶

Pembantaian ini berawal dari rencana perekrutan sukarelawan Muslim Moro melibatkan hampir 200 pemuda Samal Tausug berusia 18-30 tahun dari Sulu dan Tawi-tawi. Banyak dari mereka berasal dari etnis Tausug dan Samal yang hidup dalam perekonomian yang memprihatinkan pasca kemerdekaan. Mereka dijanjikan akan diberi gaji bulanan 50 peso Filipina. Akhirnya, sekitar 200 pemuda yang menerima tawaran ini dengan alasan ekonomi.²⁷

Pada tahap kedua pelatihan para sukarelawan berbalik memberontak ketika mengetahui misi yang sebenarnya yaitu rencana pemerintah Filipina tidak hanya memerangi saudara sesama muslim mereka di Sabah, tetapi juga akan membunuh mereka sendiri sesama komunitas muslim Samal Tausug dan kerabat mereka yang tinggal di Sabah. Selain itu, alasan terdapat pemberontakan juga disebabkan oleh gaji yang mereka terima dirasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan sehingga membuat mereka memberontak. Mereka menuntut untuk kembali pulang ke kampung halaman dan mereka pun menulis surat kepada presiden Marcos untuk meminta gaji mereka. Pada 18 Maret 1968 surat permohonan pun diterima. Namun ketika malam hari para sukarelawan Jabidah keluar dari barak masing-masing. Akan tetapi 14 sukarelawan ditembak mati dan 17 orang menghilang.²⁸ Fakta menunjukkan bahwa terjadi pembantaian ketika itu, diceritakan oleh salah satu korban yang berhasil melarikan diri, dia mengatakan bahwa ketika para

pemuda minta keluar dari kamp pelatihan dan tidak meneruskan kesertaannya mereka dilarang meninggalkan kamp lalu digiringlah mereka ke lapangan udara terdekat kamp. Mereka hendak dikembalikan ke daerah asal. Tetapi ternyata mereka dihasbisi dengan berondongan peluru tentara Filipina.²⁹ Setelah pembantaian itulah yang terjadi pada tanggal 18 Maret 1968 muncul perlawanan terhadap presiden.³⁰

Kedua, Insiden Upi. Pada Maret 1971 terjadi di wilayah Upi di bagian Utara, kota Cotabato. Yang melibatkan seorang penatap Visayan bernama Feliciano Lucas pemimpin suku Tiruray, melawan masyarakat muslim di kota Upi. Orang-orang ini melukai dan membunuh masyarakat muslim. Tokoh yang disinyalir terlibat adalah mantan perwira polisi Kristen bernama Manuel Tronco yang akan mencalonkan diri sebagai walikota Upi yang notabennya adalah sahabat Feliciano Lucas. Hal ini dilakukan melalui gerombolan-gerombolan geriliya yang sudah terlatih dengan baik menggunakan senjata tajam dan mengusir orang-orang islam dari kota Upi. Gerombolan ini disebut dengan Illaga. Illaga berasal dari organisasi bersenjata Ilongo yang terdiri dari 200 orang anggota tentara, khususnya dilatih untuk membantai orang-orang islam. Hal ini di dukung oleh kaum penatap Kristen dan pejabat pemerintah demi alasan politik ekonomi dan agama. Mereka membunuh muslim Moro dengan cara sangat mengenaskan, apabila korbannya adalah laki-laki maka telinga korban akan di potong, tetapi apabila korban adalah wanita maka puting payudaranya akan diiris.

Ketiga, Insiden Barrio. Pada bulan Juni 1971 terjadi pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh milisi illaga Kristen untuk membantai masyarakat muslim. Kejadian ini terjadi di wilayah Manili di sebuah barrio yang terletak di Kota Cermen, Cotabato Utara. Peristiwa ini bermula saat kedatangan 20 orang illaga yang membawa misi perdamaian dengan kaum muslim. Mulanya kaum muslim di kumpulkan di sebuah masjid kecil namun disitu para anggota illaga melukai kaum muslim. Kemudian mereka di giring ke sebuah sekolah dan di tembaki menggunakan peluru sehingga menyebabkan sedikitnya 70 orang masyarakat islam. Tujuan untuk menciptakan pengusiran terhadap masyarakat Islam.³¹ Kekerasan yang diterima oleh masyarakat islam adalah terjadi pemotongan telinga dan kekerasan seksual. Hal ini dilatar belakangi faktor politik oleh penguasa Kristen untuk memperluas kekuasaannya sampai Filipina Selatan. Hal ini dilakukan dengan cara mengusir orang-orang islam.³²

Keempat, Insiden Buldon. Insiden Buldon terjadi di Kota Buldon yang terletak di bagian utara Cobato. Kota ini hampir seluruhnya didiami oleh suku Iranun. Masyarakat Iranun muslim adalah masyarakat yang sopan, mencintai tradisi, sejarah dan mitologinya. Mereka berhati-hati dalam menjaga suatu hubungan dengan perkampungan Kristen. Pada saat itu kaum petani Muslim Iranun ditembaki saat mereka pergi atau pulang dari lading. Penembakannya pun misterius. Beberapa Muslim Maranao yang merupakan kerabat dekat orang-orang Iranun mengetahui peristiwa tersebut kemudian mendatangi kota Buldon dengan

semangat yang berkobar-kobar. Akibat peristiwa ini memunculkan blackshirt sebagai kelompok yang melindungi kota tersebut.³³

Di kota Buldon ini juga terdapat upaya pengusiran besar-besaran oleh kelompok illegal Kristen. Namun, yang menjadi pertanyaan dari pihak keamanan seperti polisi dan pemerintah tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan akibat adanya hal tersebut.³⁴

Gagalnya Upaya Pemerintah untuk Memenuhi Hak-Hak Minoritas Moro

Pemerintahan Filipina telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan konflik Filipina Selatan yang terjadi antara gerakan separatis minoritas Moro dengan pemerintah Filipina. Hal ini tidak bisa dilepaskan karena adanya respon dunia internasional terhadap negara Filipina terutama dunia muslim. Sehingga Filipina mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pemberian hak otonom, pendirian beberapa lembaga Islam, seperti yang sudah peneliti jabarkan di awal.

Hak-hak otonom yang dijanjikan oleh pemerintah terhadap masyarakat muslim akhirnya patah ketika pada tahun 1946 pemerintah Manila membuat program pemukiman bagi orang Kristen dari Luzon dan Visaya di wilayah Moro berdasarkan UU. No. 1888 tanggal 22 Juni 1957 dibentuklah *Commission On National Integration*. Program ini sebenarnya kelanjutan dari politik integrasi yang dilakukan AS. Hal ini mengakibatkan peralihan posisi oleh Kristen di bidang politik dan ekonomi, sehingga menyebabkan muslim Moro terpinggirkan.³⁵ Kesepakatan otonom tidak bisa menjadi harapan besar bagi muslim Filipina selatan karena karena perincian terhadap operasional sistem yang diberikan dan hubungan dengan pemerintah pusat tidak begitu jelas.

Selain itu, banyak usaha pemerintah untuk mengeksploitasi hasil tambang atau sumber daya alam lainnya di wilayah masyarakat Moro di Mindanao. Hal ini dilakukan untuk keuntungan berbagai proyek industri di wilayah Utara Filipina. Pasca merdeka banyak perusahaan multidimensional yang datang untuk mendirikan industri-industri besar di Mindanao guna memenuhi harapan pemerintah akan peningkatan ekspor Filipina.³⁶ Namun hal ini sama sekali tidak menyejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat jelas yang dialami oleh wilayah muslim. Angka kemiskinan di wilayah muslim sangat tinggi. Berdasarkan data menerangkan bahwa pendapatan perkapita di wilayah muslim adalah Php (Philippina Peso) 3.433 pada tahun 2005. Tentu sangat kontras bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita di wilayah lainnya, contohnya di 17 region lainnya adalah Php 14.186. Bahkan dikatakan wilayah termiskin kedua di Filipina pendapatan per kapitanya masih dua kali lebih baik daripada wilayah otonomi

Muslim (ARMM)³⁷, yang mana hal ini juga diakibatkan oleh susahny mendapat pekerjaan bagi masyarakat Moro.³⁸

Selain itu, pada tahun 2015 data menunjukkan bahwa kemiskinan terbesar di Filipina telah di alami oleh masyarakat Moro.³⁹ Sedangkan data lain menunjukkan bahwa perekonomian Filipina cukup mengalami kenaikan⁴⁰ hal ini juga bisa dilihat pada daerah Manila yang kemiskinannya lebih sedikit pada tahun 2015.⁴¹ Melalui data-data ini sangat menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan kesejahteraan terutama di daerah Muslim Moro.

Sehingga kesimpulannya meski terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah akibat desakan diplomatik dari beberapa negara, namun hal ini pada kenyataannya tidak menjamin kesejahteraan bagi muslim Moro. Apalagi dengan dalih pemberian hak otonom bagi masyarakat Moro. Sebagaimana data menunjukkan bahwa masyarakat Moro masih berada pada kemiskinan ditengah ketimpangan yang memperlihatkan muslim Moro berada pada posisi terendah jika dibandingkan dengan wilayah lain.

Melihat adanya penindasan yang terus dilakukan terhadap muslim Moro logikanya hanya akan ada dua pilihan sebagai minoritas yang tertindas di daerah tersebut pindah ke wilayah lain atau bertahan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Sehingga adanya gerakan separatis yang dilakukan oleh masyarakat Moro merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena mereka telah kehilangan rasa nasionalis dan kepercayaan nya terhadap negara yang diakibatkan adanya diskriminasi serta hak-hak yang tidak mereka peroleh.

Kesimpulan

Terdapat tiga hal yang menyebabkan masyarakat muslim Moro melakukan gerakan separatis. Pertama, adanya pengalaman buruk dalam konteks sejarah. Pada awalnya masyarakat muslim adalah mayoritas di Filipina, namun pasca kedatangan Spanyol untuk menjajah Filipina terdapat aksi pemurtadan yang dilakukan melalui berbagai cara sehingga pada akhirnya muslim Filipina menjadi minoritas. Selain itu, pada masa penjajahan Amerika Serikat, muslim Filipina juga mendapatkan diskriminasi melalui hak-haknya. Hal ini dilakukan oleh AS dengan cara memberikan posisi lebih kepada kaum non-muslim serta memaksakan segala kebijakan oleh AS terhadap muslim. Kedua, adanya rangkaian kejahatan kemanusiaan yang dialami oleh muslim Filipina pasca kemerdekaan, diantaranya peristiwa jaidah, upi, barrio, dan buldon yang menunjukkan kekerasan terhadap muslim serta menyebabkan banyak menewaskan masyarakat muslim secara besar-besaran. Ketiga, adanya kegagalan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Filipina Selatan. Hal ini ditandai dengan gagalnya pemerintah memberikan hak otonomi terhadap wilayah-wilayah muslim karena tetap ikut serta dalam pembangunan di wilayah tersebut tetapi sama sekali tidak

memberikan kesejahteraan bagi masyarakat muslim. Bahkan data menunjukkan ketimpangan sosial diantara wilayah yang memperlihatkan muslim Moro berada pada posisi paling miskin. Dengan adanya tiga faktor tersebut, maka gerakan separatis yang dilakukan oleh muslim Moro merupakan hal yang wajar dilakukan, melihat diskriminasi dan hak-hak yang tidak mereka peroleh.

Catatan Akhir

¹ Riswanto, dkk, "Konflik Muslim Moro Dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968 - 1996: Suatu Kajian Historis"(Makalah, Program Pendidikan Sejarah Universitas Riau).

² Siti Aisyah, "Nasionalisme Moro Sebagai Identitas Perjuangan Bangsa Moro Dalam Konflik Filipina" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

³ Riswanto, *loc. cit.*

⁴ Strobe Driver, "The Sovereign Nation-State as a Contributor to Terrorism", diakses 24 Mei 2018, <http://www.e-ir.info/2014/10/25/the-sovereign-nation-state-as-a-contributor-to-terrorism/>.

⁵ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5, *Minoritas Muslim Asia Tenggara* (Jakarta: PT. Ikrarmandiriabadi, 2002) dalam Rina Rehayati, "Minoritas Muslim: Belajar dari Kasus Minoritas Muslim di Filipina," dalam *Jurnal Ushuludin*, Vol. XVII No. 2, Juli 2011.

⁶ Fajar Bakti-Oxford, Atlas Moden Malaysia dan Dunia Edisi Baru (Sdn. Bhd:Fajar bakti, cetakan XII, 2006), khususnya Negara-negara di Dunia: Statistik Pilihan, vi. Di bawah judul Filipina, 42-43 dalam Saifullah SA, "Umat Islam di Filipina Selatan: Sejarah, Perjuangan dan Rekonsiliasi," dalam *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 3, No. 1, September 2008.

⁷ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5, *op. cit.*

⁸ Jhon Gershman, "Peta dan Prospek Gerakan Islam di Filipina", dalam Rina Rehayati, "Minoritas Muslim: Belajar dari Kasus Minoritas Muslim di Filipina," dalam *Jurnal Ushuludin*, Vol. XVII No. 2, Juli 2011.

⁹ Siti Aisyah, *op. cit.*

¹⁰ Kustigar Nadeak dan Atmadji, *Revolusi Damai Rekaman Kemelut di Filipina* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), 166.

¹¹ Wan Ahmad D.S, "Minoriti Muslim di Filipina", dalam Wan Kamal Mujani, *Minoriti Muslim Cabaran dan Harapan Menjelang Abad ke 21* (Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002).

¹² Saifullah SA, "Umat Islam di Filipina Selatan", *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 3, No. 1, September 2008.

¹³ *Ibid*, 59.

¹⁴ Erni Budiwanti, *Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina : Gerakan Separatis Moro* (Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-LIPI, 2003), 81.

¹⁵ Riswanto, *dkk, op. cit.*, 16 .

¹⁶ Garni Janto Bambang Wahyudi, *Kerjasama Regional ASEAN Menghadapi Terorisme Internasional* (Jakarta, 2003), 23.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Carolyn O. Arguillas, "The Tripoli Agreement Was Succeeding. We Had Peace", diakses 01 Juni 2018, <http://www.mindanews.com/peace-process/2015/06/the-tripoli-agreement-was-succeeding-we-had-peace-marcos/>.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Saifullah SA, *op. cit.*, 84

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Jilid 5, *op. cit.*

²⁴ Nissa Budiarti, "Muslim Moro Filipina Tragedi Jabidah di Corregidor 1968", (Skripsi, Universitas Indonesia, 2009).

²⁵ Riswanto, *op. cit.*

²⁶ Liputan 6, "Jabidah Pasukan Rahasia Filipina Untuk Rebut Sabah dari Malaysia", diakses 25 Mei 2018, <http://global.liputan6.com/read/531521/jabidah-pasukan-rahasia-filipina-untuk-rebut-sabah-dari-malaysia>.

²⁷ Web Corregior, "Peristiwa Jabidah", diakses 27 Mei 2018, <http://www.corregior.org/HeritageBattio/jabidah.html>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Soetjipto Wirosardjono, *Mikul Duwur Mendem Jero: Catatan Kedaulatan, Kebudayaan dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Republika, 2007), 168.

³⁰ Max L. Gross, *A Muslim Arhipelago: Islam And Politics in Southeast Asian* (Washington: Center For Strategic Intellegence Reseach NDIC Press, 2007), 184.

³¹ Caesar Adib Majul, *Suatu Analisa Terhadap "Silsilah Sulu"*, ed. Anwar Ibrahim, Sharon Shiddique dan Yasmin Hussain, *Islam di Asia Tenggara* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989), 50.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Djunaidi Mahbub, *Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan* (Jakarta: PT Al Ma'arif, 1975), 31.

³⁶ Siti Aisyah, *op. cit.*

³⁷ Heru Susetyo, *The Journal of a Muslim Traveler, Sebuah Jurnal Melintasi Asia, Amerika, Eropa, dan Australia* (Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2009), 14.

³⁸ Erni Budiwanti, *op. cit.*, 83.

³⁹ News Info, "The Proverty in Filiphina", diakses 01 Juni 2018, <http://Newsinfo.inquirer.net>.

⁴⁰ Izzudin, "Ekonomi Filipina Kuartal I/2016 Tumbuh 6,9% ", Media Sindows, diakses 26 Mei 2017, <http://ekbis.sindows.com/Ekonomi-Filipina-kuartal-I/2016-Tumbuh-6,9%>.

⁴¹ News Info, *op. cit.*

Daftar Referensi

- Aisyah, Siti. "Nasionalisme Moro Sebagai Identitas Perjuangan Bangsa Moro Dalam Konflik Filipina". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Arguillas, Carolyn O. "The Tripoli Agreement Was Succeeding. We Had Peace". Diakses 01 Juni 2018, <http://www.mindanews.com/peace-process/2015/06/the-tripoli-agreement-was-succeeding-we-had-peace-marcos/>.
- Budiarti, Nissa. "Muslim Moro Filipina Tragedi Jabidah di Corregidor 1968." Skripsi, Universitas Indonesia, 2009.
- Budiwanti, Erni. *Tantangan Pembangunan Negara Bangsa di Filipina: Gerakan Separatis Moro*. Jakarta: Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR-LIPI), 2003.
- Driver, Strobe. "The Sovereign Nation-State as a Contributor to Terrorism". Diakses 24 Mei 2018, <http://www.e-ir.info/2014/10/25/the-sovereign-nation-state-as-a-contributor-to-terrorism/>.
- Gross, Max L. *A Muslim Arhipelago: Islam and Politics in Southeast Asian*. Washington: Center For Strategic Intellegence Reseach NDIC Press, 2007.
- Izzudin. "Ekonomi Filipina Kuartal I/2016 Tumbuh 6,9%". Diakses 26 Mei 2017, <http://ekbis.sindows.com/Ekonomi-Filipina-kuartal-I/2016-Tumbuh-6,9%>.
- Liputan 6. "Jabidah Pasukan Rahasia Filipina Untuk Rebut Sabah dari Malaysia". Diakses 25 Mei 2018, <http://global.liputan6.com/read/531521/jabidah-pasukan-rahasia-filipina-untuk-rebut-sabah-dari-malaysia>.
- Mahbub, Djunaidi. *Pergolakan Umat Islam di Filipina Selatan*. Jakarta: PT Al Ma'arif, 1975.
- Majul, Caesar Adib. *Suatu Analisa Terhadap "Silsilah Sulu"*, ed. Anwar Ibrahim, Sharon Shiddique dan Yasmin Hussain. *Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1989.
- Mujani, Wan Kamal. *Minoriti Muslim Cabaran dan Harapan Menjelang Abad ke 21*. Universitas Kebangsaan Malaysia, 2002.
- Nadeak, Kustigar dan Atmadji. *Revolusi Damai Rekaman Kemelut di Filipina*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986.
- News Info. "The Proverty in Filiphina". Diakses 01 Juni 2018, <http://Newsinfo.inquirer.net>.
- Rehayati, Rina. "Minoritas Muslim: Belajar dari Kasus Minoritas Muslim di Filipina", dalam *Jurnal Ushuludin*, Vol. XVII No. 2, Juli 2011.

- Riswanto, dkk. "Konflik Muslim Moro Dengan Pemerintah Filipina Tahun 1968 – 1996: Suatu Kajian Historis." Makalah, Program Pendidikan Sejarah Universitas Riau.
- SA, Saifullah. "Umat Islam di Filipina Selatan: Sejarah, Perjuangan dan Rekonsiliasi", dalam *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 3, No. 1, September 2008.
- Susetyo, Heru. *The Journal of a Muslim Traveler, Sebuah Jurnal Melintasi Asia, Amerika, Eropa, dan Australia*. Jakarta: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2009.
- Wahyudi, Garni Janto Bambang. *Kerjasama Regional ASEAN Menghadapi Terorisme Internasional*. Jakarta, 2003.
- Web Corregior. "Peristiwa Jabida". Diakses 27 Mei 2018, <http://www.corregior.org/HeritageBattio/jabidah.html>.
- Wirosardjono, Soetjipto. *Mikul Duwur Mendem Jero: Catatan Kedaulatan, Kebudayaan dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Republika, 2007.